

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia dikenal memiliki ragam destinasi wisata yang melimpah. Salah satu bentuk pengembangan yang semakin berkembang adalah desa wisata, yang merupakan integrasi dari potensi alam, budaya lokal, serta kegiatan ekonomi kreatif dalam satu wilayah terpadu. Dukungan pemerintah terhadap pengembangan desa wisata tercantum dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata yang menekankan prinsip-prinsip pembangunan pariwisata yang berkelanjutan, berbasis masyarakat, dan berwawasan lingkungan. Hal ini juga termasuk mengatur peran serta pemerintah daerah dalam pengembangan sektor pariwisata dengan melaksanakan fungsi perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian. Fokus utama dari pengembangan desa wisata yaitu meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui upaya pemberdayaan.

Wujud nyata pemerintah Indonesia dalam mengembangkan pariwisata nasional juga tertuang dalam langkahnya menetapkan 10 destinasi prioritas yang dikenal dengan “10 Bali baru” yang bertujuan untuk menciptakan destinasi wisata unggulan selain Bali, sejalan dengan arahan Presiden RI tahun 2015 dan 2016. Beberapa kawasan yang termasuk dalam destinasi tersebut antara lain Danau Toba di Sumatera Utara, Candi Borobudur di Jawa Tengah, Mandalika di Lombok NTB, Labuan Bajo di NTT, Bromo-Tengger-Semeru di Jawa Timur, Kepulauan Seribu di DKI Jakarta, Tanjung

Lesung di Banten, Wakatobi di Sulawesi Tenggara, Morotai di Maluku Utara, serta Tanjung Kelayang di Bangka Belitung. Langkah lain yang juga dilakukan pemerintah Indonesia yaitu menetapkan beberapa Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata untuk menarik investasi dan meningkatkan daya saing pariwisata daerah. Pemerintah Indonesia juga terus mendorong investasi di KEK Pariwisata ini dengan memberikan beberapa insentif seperti pembebasan pajak, kemudahan perizinan, dan pembangunan infrastruktur penunjang.

Jawa Tengah menjadi salah satu provinsi yang memiliki potensi cukup besar di pariwisata, sebagaimana terlihat dari jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan domestik di masing-masing kabupaten dan kota di wilayah tersebut (tabel 1.1).

**Tabel 1. 1 Data Jumlah Wisatawan Mancanegara dan Domestik per
Kabupaten/Kota Tahun 2022**

Kabupaten/Kota	Mancanegara	Domestik	Total Wisatawan (Orang)
KABUPATEN			
Klaten	60.461	4.755.621	4.816.082
Semarang	622	3.810.236	3.810.858
Banyumas	-	2.626.837	2.626.837
Magelang	67.754	2.525.421	2.593.175
Purbalingga	6	2.249.573	2.249.579
Jepara	5.048	1.780.857	1.785.905
Banjarnegara	-	1.748.969	1.748.969
Kudus	11	1.732.989	1.733.000
Demak	4	1.575.708	1.575.712
Kebumen	12	1.461.767	1.461.779
Pemalang	-	1.331.076	1.331.076
Purworejo	-	1.241.210	1.241.210
Wonosobo	-	1.224.107	1.224.107
Rembang	-	1.075.960	1.075.960
Karanganyar	1.548	986.729	988.277
Pati	23	950.520	950.543
Cilacap	-	887.091	887.091
Batang	-	822.099	822.099
Kendal	10	773.829	773.839
Temanggung	41	577.920	577.961
Pekalongan	-	533.389	533.389
Grobogan	-	526.195	526.195
Blora	2	498.162	498.164
Tegal	-	458.304	458.304
Boyolali	183	443.053	443.236
Sragen	49	258.353	258.402
Wonogiri	-	236.052	236.052
Sukoharjo	-	172.295	172.295
Brebes	648	80.290	80.938
KOTA			
Semarang	4.918	5.338.233	5.343.151
Pekalongan	85	1.037.984	1.038.069
Surakarta	3.171	1.014.232	1.017.403

Tegal	-	865.470	865.470
Magelang	93	721.893	721.986
Salatiga	2	143.013	143.015

Sumber: Jumlah Kunjungan Wisatawan ke Destinasi Wisata dan Event berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah, 2022. (jateng.bps.go.id)

Berdasarkan tabel diatas, Kabupaten Purbalingga memiliki jumlah wisatawan terbanyak pada urutan kelima diantara semua kabupaten di Jawa Tengah dengan jumlah 2.249.579 wisatawan selama 2022. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Purbalingga Tahun 2015-2025, menjelaskan bahwa akan masuk dalam jajaran daerah yang akan difokuskan sebagai tujuan wisata. Provinsi Jawa Tengah berupaya menjadikan pariwisata sebagai kontributor utama bagi perekonomian lokal. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2027 telah sesuai dengan tujuan tersebut.

Tabel 1. 2 Data Jumlah Pendapatan Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Tengah (Januari – September 2022)

Kab/Kota	Pendapatan (Rp)
Kab. Klaten	39.266.623.580
Kab. Purbalingga	26.941.677.175
Kab. Semarang	25.253.716.027
Kab. Banjarnegara	23.386.295.003
Kab. Kebumen	14.069.974.580
Kota Surakarta	9.905.614.541
Kab. Temanggung	5.920.832.873
Kota Magelang	4.898.807.833
Kab. Cilacap	4.363.090.500
Kota Pekalongan	4.300.135.626
Kab. Wonosobo	4.067.866.700

Kota Semarang	3.956.089.886
Kab. Sukoharjo	3.697.999.000
Kab. Demak	2.939.670.000
Kab. Batang	2.034.744.250
Kab. Purworejo	1.923.230.000
Kota Salatiga	1.787.118.437
Kab. Tegal	1.619.966.600
Kab. Wonogiri	1.500.454.600
Kab. Pekalongan	1.183.532.885
Kab. Sragen	1.034.286.000
Kab. Boyolali	818.219.500
Kab. Karanganyar	316.996.110
Kab. Brebes	303.485.001
Kab. Pati	236.614.015
Kab. Blora	14.925.065
Kab. Banyumas	127.602
Kab. Magelang	111
Kab. Kendal	78
Kab. Pemalang	25
Kab. Rembang	22
Kota Tegal	-
Kab. Grobogan	-
Kab. Kudus	-
Kab. Jepara	-
Total	185.742.093.625

Sumber: Statistik Pariwisata Jawa Tengah Dalam Angka Tahun 2022 (<https://disporapar.jatengprov.go.id/>) (2022)

Kabupaten Purbalingga pada tahun 2022 terhitung sampai bulan September memiliki jumlah pendapatan sebesar Rp26,941,677,175 (lihat tabel 1.2). Dari 35 kabupaten dan kota di Jawa Tengah, Kabupaten Purbalingga memiliki pendapatan pariwisata tertinggi kedua setelah Kabupaten Klaten.

Menurut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purbalingga, yang merupakan acuan dari RPJP, industri pariwisata saat ini sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi lokal. Industri

pariwisata berkembang sebagai hasil dari inisiatif untuk memanfaatkan potensi alam dan pengembangan atraksi buatan manusia yang unik dan berkualitas tinggi. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga No. 11 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Tahun 2015-2025 semakin mendukung inisiatif pengembangan pariwisata. Bunyi Pasal 2 Ayat 5 Huruf (d) adalah:

“...pembangunan kepariwisataan Kabupaten dengan mengembangkan: organisasi Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi, optimalisasi pelayanan dan mekanisme operasional yang efektif dan efisien dalam rangka mendorong terwujudnya pembangunan kepariwisataan.”

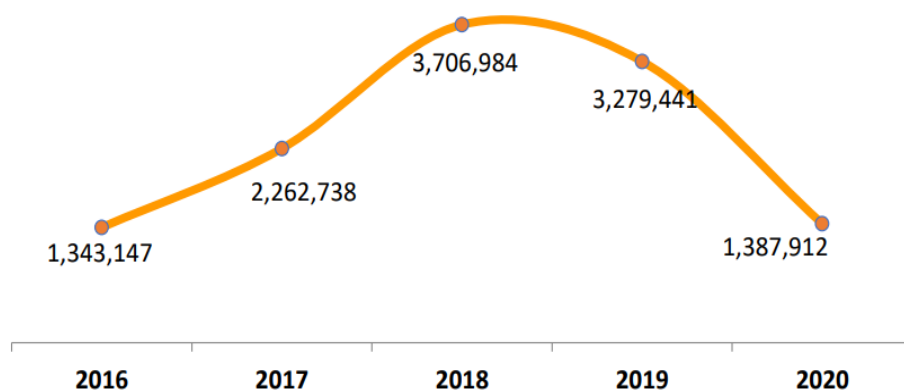
Industri pariwisata saat ini menjadi kontributor utama bagi pertumbuhan ekonomi daerah, menurut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purbalingga, yang merupakan acuan dari RPJP. Memanfaatkan potensi alam dan mengembangkan atraksi buatan manusia yang unik dan berkualitas tinggi adalah dua cara untuk mengembangkan industri pariwisata. Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2015 Kabupaten Purbalingga tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Tahun 2015-2025 juga mendukung inisiatif pengembangan pariwisata. Menurut Pasal 2 Ayat 5 Huruf (d),

“...arah pembangunan kepariwisataan Kabupaten dilaksanakan dengan cara terpadu, lintas sektor, dan lintas perilaku; dan mendorong kemitraan sektor publik dan privat.”

Meningkatnya jumlah wisatawan yang mengunjungi tempat wisata merupakan tanda keberhasilan industri pariwisata. Namun, karena epidemi, jumlah wisatawan turun secara signifikan pada tahun 2020, dengan

1.387.912 orang mengunjungi semua tempat wisata. Dibandingkan dengan tahun 2019, ketika 3.279.441 orang mengunjungi semua tempat wisata di Purbalingga, angka ini turun secara signifikan (lihat Gambar 1.2). Terdapat 54.960 wisatawan di Kabupaten Purbalingga selama periode Natal dan Tahun Baru 2022, meningkat 100% dari tahun 2021 (Kompas.com).

Gambar 1. 1 Grafik Kunjungan Wisata di Purbalingga 2016 - 2020



Sumber: RPJMD Kab. Purbalingga Tahun 2021-2026

Desa Wisata Limbasari merupakan penyumbang PAD terbesar kedelapan di Kabupaten Purbalingga dari seluruh komunitas wisata yang bermunculan di Purbalingga (lihat tabel 1.3). Desa Wisata Limbasari harus memilih tindakan terbaik untuk terus mengembangkan potensi wisatanya dibandingkan dengan desa wisata lainnya.

**Tabel 1. 3 Kunjungan Wisata Kabupaten Purbalingga per Desa Wisata
Tahun 2022**

Nama Desa Wisata	Wisnus	Pendapatan (Rp)
Desa Wisata Tlahab Kidul	13,563	108,504,000
Desa Wisata Bantar Barang	0	0
Desa Wisata Bokol	0	0
Desa Wisata Bumisari	404	2,020,000
Desa Wisata Cipaku	0	0
Desa Wisata Gemuruh	11,185	111,850,000
Desa Wisata Gunung Wuled	3,893	19,465,000
Desa Wisata Kaliori	0	0
Desa Wisata Karangbanjar	14,818	74,090,000
Desa Wisata Karangcegak	73,814	369,050,000
Desa Wisata Karangcengis	2,891	14,455,000
Desa Wisata Karangjengkol	0	0
Desa Wisata Karangreja	0	0
Desa Wisata Karangtalun	0	0
Desa Wisata Kedung Benda	7,741	38,705,000
Desa Wisata Kutabawa	0	0
Desa Wisata Limbasari	5,261	52,610,000
Desa Wisata Onje	5,518	55,180,000
Desa Wisata Pagerandong	631	0
Desa Wisata Panusupan	1,335	6,675,000
Desa Wisata Pekiringan	0	0
Desa Wisata Pepedan	30	0
Desa Wisata Sangkanayu	5,775	28,875,000
Desa Wisata Selakambang	2,571	12,855,000
Desa Wisata Serang	257,292	2,425,195,000
Desa Wisata Serayu Larangan	0	0
Desa Wisata Sirau	5,205	26,025,000
Desa Wisata Siwarak	0	0
Desa Wisata Slinga	6,517	23,683,000
Desa Wisata Tanalum	14,794	73,970,000
Desa Wisata Tumanggal	670	4,850,000
JUMLAH	433,908	3,448,057,000

Sumber: Statistik Pariwisata Jawa Tengah Dalam Angka Tahun 2022
(<https://disporapar.jatengprov.go.id/>) (2022)

Sejak 2013, Desa Wisata Limbasari telah masuk dalam program pengembangan destinasi wisata di wilayah Kabupaten Purbalingga. Desa

Wisata Limbasari terletak di Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga, sekitar 15 kilometer sebelah utara dari pusat kota. Bagi mereka yang menyukai wisata alam, lokasinya yang berada di lembah Gunung Tukung dan Gunung Pelana menjadi daya tarik tersendiri. Desa wisata Limbasari terverifikasi sebagai Desa Wisata berkembang per Maret 2022 (jadesta.kemenparekraf.go.id/desa/limbasari). Wisata unggulan di Desa Limbasari yaitu terdapat Wisata Edukasi Batik, *River Tubing*, Wisata Alam Patrawisa, *River Camp*, dan Wisata Alam Patrawisa. Desa Wisata Limbasari turut dikelola oleh suatu organisasi Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Patrawisa yang dibentuk pada bulan Mei 2012 dengan jumlah sekitar 30 orang anggota aktif maupun pasif.

Gambar 1. 2 Wisata *River Tubing*



Sumber: limbasari.desa.id

Dalam proses pengembangannya, Desa Wisata Limbasari masih menghadapi berbagai tantangan dibalik potensinya yang cukup menjanjikan. Salah satu kendala utama dalam pengembangan Desa Wisata Limbasari adalah belum optimalnya kemitraan antara *stakeholder* yang terlibat, seperti

pemerintah daerah, Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), masyarakat lokal, dan pihak swasta. Rencana pengembangan destinasi, peningkatan fasilitas dan atraksi pengunjung, dan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan dengan mengutamakan potensi dan ciri khas lokal merupakan hal yang penting bagi kota wisata, menurut Rizky dkk. (2018). Melalui kolaborasi dengan penduduk lokal, khususnya Pokdarwis Patrawisa, Dinporapar Kabupaten Purbalingga didorong untuk meningkatkan pendapatan dan kunjungan pariwisata. Dalam konsep pengelolaan desa wisata, kemitraan menjadi faktor penting untuk menjamin keberlanjutan pengelolaan dan pengembangannya. Pemerintah daerah telah berperan dalam penyediaan regulasi dan dukungan kebijakan, namun pelaksanaannya masih belum sepenuhnya terintegrasi dengan kebutuhan di tingkat lokal. Pokdarwis, sebagai mitra utama dalam pengelolaan desa wisata, juga masih menghadapi keterbatasan dalam hal sumber daya manusia, perencanaan, serta promosi wisata. RPJMD Kabupaten Purbalingga 2021-2026 dihadapkan pada sejumlah masalah di sektor pariwisata, termasuk jumlah pengunjung yang menurun dan masa tinggal pengunjung yang singkat, kurangnya kerja sama antar pemangku kepentingan, infrastruktur, fasilitas, dan aksesibilitas yang tidak memadai ke destinasi wisata, serta kurangnya sumber daya manusia, dukungan masyarakat, dan cerita pengembangan pariwisata yang menarik.

Selain meningkatkan keterlibatan masyarakat secara aktif untuk pengelolaan yang berkelanjutan, infrastruktur dan aksesibilitas Desa Wisata

Limbasari masih perlu ditingkatkan untuk menarik lebih banyak wisatawan. Menurut Tri Marini (2022), pendekatan pengembangan masyarakat di Purbalingga masih bersifat tradisional, dengan sedikit partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program dan sedikit keterlibatan masyarakat dalam perencanaan. Di sisi lain, sarana dan prasarana penunjang termasuk akses menuju tempat wisata cenderung sulit dan transportasi menuju daerah wisata masih belum maksimal sehingga menghambat peningkatan kunjungan wisatawan.

Melihat kondisi yang dijelaskan tersebut, diperlukan penelitian untuk menganalisis bagaimana kemitraan antara *stakeholder* dalam pengembangan Desa Wisata Limbasari berjalan, serta faktor-faktor yang mendukung dan menghambat kemitraan tersebut. Kemitraan Desa Wisata Limbasari yang belum terjalin secara maksimal untuk bisa menjadi desa wisata penyumbang pendapatan daerah lebih banyak lagi, maka peneliti tertarik untuk menganalisis **“Bagaimana Kemitraan antar *Stakeholder* dalam Pengembangan Desa Wisata Limbasari di Kabupaten Purbalingga”**.

1.2 Identifikasi Masalah

- 1) Peran pemerintah masih dominan dalam pengembangan desa wisata.
- 2) Pokdarwis sebagai mitra pengembangan desa wisata masih belum optimal dalam menjalankan tugasnya.
- 3) Infrastruktur dan akses jalan menuju Desa Wisata Limbasari masih belum memadai.

- 4) Kesadaran masyarakat akan adanya potensi Desa Wisata Limbasari masih perlu ditingkatkan lagi.

1.3 Rumusan Masalah

Dengan mempertimbangkan uraian latar belakang tersebut, rumusan masalah yang muncul adalah:

- 1) Bagaimana kemitraan dalam pengembangan Desa Wisata Limbasari di Kabupaten Purbalingga?
- 2) Apa faktor pendorong dan penghambat kemitraan dalam pengembangan Desa Wisata Limbasari?

1.4 Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah yang telah dirumuskan, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis kemitraan dalam pengembangan Desa Wisata Limbasari.
2. Menganalisis faktor pendorong dan penghambat kemitraan dalam pengembangan Desa Wisata Limbasari.

1.5 Kegunaan Penelitian

1.5.1 Kegunaan Praktis

1. Bagi Peneliti

Melalui penelitian ini, para peneliti dapat mempraktikkan ilmu yang telah dipelajari di bangku perkuliahan.

2. Bagi Organisasi Terkait

Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat memberikan perspektif dan saran dari luar tentang kolaborasi dalam pertumbuhan Desa Wisata Limbasari.

3. Bagi Pembaca

Pembaca dapat mempelajari lebih lanjut tentang kolaborasi dalam pendirian Desa Wisata Limbasari dari penelitian ini.

1.5.2 Kegunaan Teoritis

Pengetahuan dan wawasan tentang kolaborasi dalam pertumbuhan desa wisata dapat diperoleh lebih lanjut dengan melakukan penelitian ini.

1.6 Kajian Pustaka

1.6.1 Penelitian Terdahulu

Peneliti mengambil dan menjadikan beberapa artikel yang relevan dengan menggunakan pola kemitraan untuk dijadikan referensi sebagai bahan pembelajaran serta sebagai bukti bahwa penelitian ini adalah hasil asli karya peneliti dan sebagai bukti tidak melakukan plagiarisme.

Tabel 1. 4 Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti/Tahun	Tujuan	Metode	Hasil Penelitian
1.	Kamariyah, S. (2020).	Melakukan analisis secara menyeluruh mengenai pola kemitraan antara Pemerintah	Kualitatif	Kerja sama Green Watu Dodoll dan PT. Pelindo di Desa Ketapang masih belum terlaksana secara optimal. Kondisi ini terlihat dari stagnasi perkembangan pembangunan di kawasan wisata Green Watu Dodoll

		Kabupaten Banyuwangi dan PT. Pelindo dalam pengelolaam destinasi wisata Green Watu Dodol di Desa Ketapang, Kabupaten Banyuwangi, serta menyusun saran atau rekomendasi untuk optimalisasi pengelolaan objek wisata tersebut di masa mendatang.		yang dikelola oleh Pemerintah Desa Ketapang.
2.	Susisusanti, S. (2021).	Bertujuan mengidentifikasi pola kemitraan yang terbentuk antara pemerintah desa dan masyarakat dalam pengelolaan Rumah Adat Uma Ncuhi, serta mengkaji upaya kolaboratif antara kedua pihak tersebut dalam rangka pengembangan pariwisata di Desa Mbawa, Kecamatan Donggo, Kabupaten Bima.	Kualitatif deskriptif	Bentuk kemitraan antara pemerintah desa dengan masyarakat dalam pengelolaan rumah adat ncuhi sebagai bagian dari pengembangan pariwisata di Desa Mbawa, Kecamatan Donggo, Kabupaten Bima masih belum berjalan secara optimal. Baik pihak pemerintah desa maupun masyarakat masih kurang memahami makna secara tujuan kemitraan dalam mendukung pembangunan kepariwisataaan. Upaya yanh dilakukan oleh pemerintah desa untuk mengembanhkan sektor pariwisata di Desa Mbawa juga belum terlaksana secara maximal akibat masih ada banyak kelemahan dalam proses pelaksanaannya.
3.	Hani, U., & Astuti, P. (2022).	Bertujuan menjelaskan bentuk kemitraan antara pemerintah dan masyarakat dalam mengoptimalkan penerapan konsep	Deskriptif kualitatif	Ditemukan dalam penelitian ini bahwa pola kemitraan yang terjalin bersifat mutualistic. Kolaborasi dalam optimalisasi konsep ekowisata untuk pengembangan pariwisata Karimunjawa melibatkan sinergi antara Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jepara, DLH

		ekowisata guna mendukung pengembangan sektor pariwisata di Karimunjawa, Kabupaten Jepara.		Kabupaten Jepara, serta masyarakat local Karimunjawa yang telah berjalan secara baik dengan pola kemitraan mutualistic. Namun demikian, masih terdapat kendala berupa kurangnya koordinasi serta minimnya pemahaman masyarakat terkait pengelolaan sampah rumah tangga.
4.	Yumardi, A. (2022).	Penelitian ini menjelaskan pengetahuan dan pengamalan pola kemitraan antara pemerintah daerah dan masyarakat dalam pengelolaan pengembangan objek wisata. Selain itu, juga untuk menguraikan tujuan, manfaat, serta berbagai kendala yang dihadapi dalam proses kemitraan tersebut.	Kualitatif deskriptif	Kerjasama antara Dinporapar dengan Pokdarwis dalam pengembangan wisata air terjun muara karing tergolong cukup berhasil, khususnya dalam upaya membina masyarakat agar mengubah pola pikir tentang pentingnya menjaga kelestarian alam serta meningkatkan kesadaran wisata. Keberhasilan ini memberikan dampak positif bagi masyarakat, antara lain berupa peningkatan pendapatan dan perbaikan taraf hidup yang berujung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
5.	Siswoyo, M., Komara, A., Siddiq, D. M., Putra, Y. P., & Lestari, I. (2022).	Mengkaji potensi embung yang berada di Desa Sarwadadi, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, serta menyusun rekomendasi terkait model pengembangan yang dapat diterapkan.	Kualitatif	Kerjasama pemerintah desa, kecamatan, dan kabupaten, serta masyarakat setempat dan kelompok masyarakat sipil dalam pengelolaan Embung Nglanggeran menjadi contoh model yang layak ditiru. Melalui keterlibatan erat para pemangku kepentingan, pengelolaan Embung Nglanggeran berhasil meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat sekitar.
6.	Mokodongan, T., Yuniati, N.,	Mengidentifikasi bentuk pola kemitraan yang	Kualitatif deskriptif	Secara umum, hotel membangun hubungan kemitraan dengan mitra usahanya melalui Pola Kemitraan

	& Sarbini, S. (2023).	terjalin dalam sektor perhotelan di Gorontalo, serta menganalisis dampak dari kemitraan tersebut terhadap perkembangan dan keberlanjutan bisnis perhotelan di wilayah tersebut.		Intiplasma dan Subkontrak. Penerapan kedua bentuk kemitraan ini memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan bisnis hotel, khususnya dalam perluasan aset dan kepemilikan properti.
7.	Janata, E. S., & retno Faridatussalam, S. (2023).	Mengkaji pola kemitraan antara BUMN dan BUMDes dalam pemanfaatan program CSR di Balkondes, serta mengevaluasi bentuk partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program tersebut sebagai bagian dari pembangunan berbasis komunitas.	Deskriptif kualitatif	Kemitraan antara BUMN dan BUMDes dalam pemanfaatan dana CSR di Balkondes berjalan melalui enam tahapan, namun tahapan awal seperti persiapan, pengkajian, dan perencanaan masih belum terlaksana secara optimal. Partisipasi masyarakat terlihat dalam tiga bentuk utama: peningkatan kesadaran melalui keterlibatan di berbagai kegiatan dan media sosial, pengembangan kapasitas lewat sosialisasi dan pelatihan dasar, serta peningkatan keterampilan lanjutan untuk mendukung keberlanjutan program.
8.	Jabalnur, J., Safiuddin, S., Intan, N., Ukkas, J., Suciati, M., & Tabiu, R. (2023).	Mengidentifikasi pola kemitraan konservasi yang diterapkan pada hutan mangrove dalam zona pemanfaatan tradisional, serta menganalisis dampak dari pola kemitraan tersebut terhadap upaya pelestarian ekosistem hutan mangrove.	Hukum normatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk kemitraan konservasi di kawasan hutan mangrove dalam zona pemanfaatan tradisional diwujudkan melalui pengakuan terhadap praktik pemanfaatan lokal yang telah diwariskan secara turun-temurun oleh masyarakat adat. Pola ini mengakomodasi kearifan lokal dalam pengelolaan sumber daya alam di wilayah Taman Nasional Rawa Aopa Watumohai. Kemitraan tersebut berdampak positif terhadap pelestarian ekosistem, di mana kolaborasi antara masyarakat dan pihak balai taman nasional mendorong pemanfaatan potensi secara berkelanjutan sekaligus

				menjaga kelangsungan ekosistem mangrove.
9.	Reza Hanaya, (2023).	Tri R.	Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan menjelaskan implementasi pola kemitraan usaha perkebunan kelapa sawit di Kecamatan Bunut, Kabupaten Pelalawan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2019. Selain itu, penelitian ini juga mengeksplorasi perspektif Fiqh Siyasah terhadap pola kemitraan tersebut dalam konteks keadilan dan tata kelola kerja sama ekonomi yang berbasis nilai-nilai syariah.	Kualitatif Pola kemitraan usaha perkebunan kelapa sawit di Kecamatan Bunut, Kabupaten Pelalawan, telah diterapkan, namun pelaksanaannya belum sepenuhnya efektif sesuai kesepakatan awal. Hambatan yang muncul antara lain lemahnya komunikasi dalam pengelolaan, rendahnya tingkat kepercayaan, perbedaan pandangan di antara pihak terkait, serta minimnya kesadaran masyarakat, yang secara keseluruhan menghambat optimalisasi kemitraan tersebut.
10.	Muhammad, J. (2023).		Utuk mengkaji pola pengelolaan ekowisata berbasis masyarakat (community based ecotourism) di kawasan Air Terjun Segenter, serta menetapkan prioritas alternatif komponen pola yang paling relevan untuk diimplementasika	Deskriptif kualitatif & kuantitatif Pengelolaan ekowisata Air Terjun Segenter yang berbasis masyarakat mengadopsi beberapa pola utama, yaitu pendidikan dan peningkatan kesadaran lingkungan, penguatan kapasitas lokal, kemitraan dengan pihak eksternal, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat setempat. Berdasarkan hasil analisis, aspek perencanaan menempati kriteria tertinggi dengan persentase sebesar 35%. Sementara itu, strategi prioritas dalam pengelolaan diarahkan pada pola pemberdayaan ekonomi lokal,

		n dalam pengelolaan ekowisata secara berkelanjutan.		yang memperoleh bobot tertinggi sebesar 16,2%.
--	--	---	--	--

Sumber: Jurnal yang diolah, 2025.

Berdasarkan tinjauan pustaka di atas, peneliti tidak akan melakukan penelitian mengenai kemitraan pemangku kepentingan dalam pengembangan Desa Wisata Limbasari, Kabupaten Purbalingga. Selain itu, berdasarkan pencarian literatur yang telah dilakukan peneliti terkait pola kemitraan lebih fokus ke bagian keberhasilan masing-masing peran *stakeholder* terkait objek kerjasamanya. Dapat ditarik kesimpulan bahwa studi mengenai kemitraan pemangku kepentingan dalam pengembangan Desa Wisata Limbasari, Kabupaten Purbalingga, baru pertama kali dilakukan.

1.6.2 Administrasi Publik

Administrasi publik, seperti yang didefinisikan oleh Felix A. dan Lloyd Nigro (1984), adalah kerja sama tim di lingkungan publik, swasta, dan privat untuk memberikan layanan kepada masyarakat (dalam Kismartini & Irfan Murtadho Yusuf, 2023: 2). Keban (2019) menyatakan bahwa tujuan administrasi publik adalah untuk mengatasi masalah-masalah publik dengan memperbaiki komponen organisasi, sumber daya manusia, dan keuangan masyarakat (dalam Kismartini & Irfan Murtadho Yusuf, 2023: 2).

Manajemen publik dan kebijakan publik termasuk dalam administrasi publik. Fokus dari kebijakan publik adalah bagaimana pemerintah membuat keputusan untuk mengatasi masalah-masalah masyarakat. Hal ini melibatkan proses perumusan, implementasi, dan evaluasi kebijakan yang bertujuan untuk mencapai tujuan tertentu dalam masyarakat. Manajemen publik berkaitan dengan pengelolaan sumber daya dan aktivitas administratif oleh pemerintah untuk mencapai tujuan, mencakup perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian dalam penyelenggaraan layanan publik. Kebijakan publik dan manajemen publik saling berkaitan dalam proses administrasi publik karena kebijakan publik menentukan arah dan tujuan yang ingin dicapai sedangkan manajemen publik memastikan bahwa sumber daya dan aktivitas yang dikelola dengan tepat dan efisien untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

1.6.3 Paradigma Administrasi Publik

Kumpulan cara pandang atau cara berpikir seseorang mengenai suatu masalah dan bagaimana cara menyelesaikannya disebut paradigma. Thomas S. Kuhn menyatakan bahwa paradigma adalah sikap, pendekatan, dan prinsip-prinsip yang digunakan ketika meneliti fenomena sosial dari sudut pandang ilmiah. Terdapat enam paradigma utama dalam administrasi publik yang menggambarkan bagaimana disiplin ilmu ini berkembang dalam pemikiran.

1. Kritik Woodrow Wilson terhadap campur tangan politik dalam birokrasi menjadi pendorong dikotomi politik dan administrasi yang berlangsung dari tahun 1900 hingga 1926. Terlepas dari kenyataan bahwa politik dan administrasi sulit untuk dipisahkan dalam praktiknya, paradigma ini menekankan pemisahan keduanya demi efisiensi.
2. Prinsip-prinsip Administrasi Publik (1927-1937) terlalu menekankan pada kegiatan manajerial dan mengabaikan pengaturan birokrasi sebagai fokus, meskipun mereka mempromosikan efisiensi birokrasi melalui prinsip-prinsip manajemen (POAC).
3. Administrasi sebagai Ilmu Politik (1950-1970): Pendekatan ini menghubungkan ilmu politik dengan administrasi publik, namun pendekatan ini menjadi bias karena sudut pandang politik mendominasi, sehingga memunculkan kritik dan paradigma baru.
4. Fokus Administrasi sebagai Ilmu Administrasi (1956-1970) adalah pada perilaku organisasi dan teknik-teknik teknologi, tetapi fleksibilitas dari fokus yang terlalu luas menyebabkan batasan-batasannya menjadi kabur.
5. Administrasi sebagai Ilmu Administrasi Publik (1970-sekarang): Ketika administrasi publik semakin populer, administrasi mulai berfokus pada kepentingan masyarakat umum dan juga negara.
6. Untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik, tata kelola pemerintahan (1990-sekarang) memberikan penekanan yang kuat

pada kerja sama antara sektor publik, swasta, dan sosial. Dalam rangka membangun pemerintahan yang lebih efektif dan partisipatif, paradigma ini sangat menekankan pada para aktor yang bekerja sama.

Tata kelola, paradigma keenam, digunakan dalam penelitian ini. Paradigma tata kelola berbicara tentang bagaimana semua aspek masyarakat harus diikutsertakan dalam pencapaian tata kelola yang efektif. Elemen-elemen dalam kebijakan publik termasuk di dalamnya adalah aktor yang terlibat, oleh karenanya, penelitian mengenai peranan aktor implementasi kebijakan yang tidak lagi berpusat hanya pada pemerintah saja, tetapi melibatkan aktor lain, seperti masyarakat, swasta, dan lain lain sangat relevan dengan paradigma keenam ini, yaitu Paradigma *Governance*.

1.6.4 Governance

Lebih dari sekadar “pemerintah”, tata kelola menekankan partisipasi beberapa pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaannya, sambil menangani masalah dan tantangan yang lebih rumit. *Governance* juga dipahami sebagai peralihan dari penyelenggaraan kebijakan publik yang melibatkan aktor lain untuk berpartisipasi baik masyarakat, swasta, dan lainnya (Dwiyanto (2018) dalam Retno Sunu Astuti, dkk. 2020:32).

Ada tiga karakteristik utama yang membedakan tata kelola pemerintahan dengan administrasi publik tradisional. Pertama, dimensi kelembagaan, yang mencerminkan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan dalam urusan publik dengan memasukkan berbagai pemain dari sektor pemerintah dan non-pemerintah dalam sistem administrasi. Kedua, dimensi nilai, yang mendukung penggunaan kekuasaan dan mencakup nilai-nilai prosedural yang mendorong perilaku demokratis, seperti kejujuran dan toleransi, serta nilai-nilai substantif, seperti keyakinan yang diajarkan. Komponen ketiga adalah dimensi proses, yang menggambarkan bagaimana para pemangku kepentingan menangani isu-isu publik pada setiap tahap proses pembuatan kebijakan, mulai dari identifikasi hingga penilaian.

Manajemen pemerintahan yang mengikutsertakan para pemangku kepentingan dari luar pemerintahan melalui diskusi kelompok dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik dikenal dengan istilah *collaborative governance*. Kompleksitas permasalahan masyarakat yang membutuhkan partisipasi dari beberapa aktor memunculkan konsep ini (multi-aktor). Menurut Bovaird dalam Dwiyanto, kemitraan (*partnership*) - istilah yang sering digunakan untuk menggambarkan *collaborative governance* - adalah upaya kerjasama antara sektor publik dan swasta yang didasarkan pada prioritas yang sama.

1.6.5 Kemitraan

Secara formal bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama, kemitraan dibentuk oleh orang, kelompok, atau organisasi. Seperti yang dinyatakan oleh Ambar Teguh Sulistiyani, istilah “kemitraan” mengacu pada aliansi antara dua pihak atau lebih yang didirikan atas dasar saling membutuhkan dan kesepakatan untuk meningkatkan kemampuan dan mencapai hasil yang lebih baik. Tujuan bersama, saling ketergantungan, dan kesepakatan diperlukan agar kemitraan berhasil.

Lima ciri utama kemitraan antar organisasi disebutkan oleh Huxham dan Siv Vangen: (1) Tujuan Bersama: tujuan bersama dari kerja sama; (2) Berbagi Kekuatan: kontribusi keterampilan masing-masing pihak berdasarkan keahlian; (3) Kompromi: pembentukan kompromi untuk menyelesaikan perbedaan pendapat; (4) Komunikasi: penggunaan bahasa yang efektif dan kontekstual; dan (5) Komitmen Penentuan: dedikasi untuk bekerja sama secara berkelanjutan untuk mencapai hasil yang diinginkan.

Menurut Notoatmodjo (2010: 244-245) ada tiga prinsip penting dalam kemitraan yaitu kesetaraan, transparansi, dan saling menguntungkan. Prinsip-prinsip tersebut dapat dijadikan sebagai tolak ukur dalam keberhasilan pelaksanaan kemitraan antar *stakeholder*. Tiga prinsip tersebut diuraikan sebagai berikut:

- 1) Kesetaraan atau keseimbangan (*equity*)

Alih-alih bersifat dari atas ke bawah, dari bawah ke atas, atau berbasis kekuasaan, strategi ini sering kali menekankan rasa hormat, rasa terima kasih, dan kepercayaan di antara para pihak. Membangun rasa saling percaya diperlukan untuk mencegah permusuhan. Rasa hormat, tugas, dan hubungan merupakan bagian dari kesetaraan ini.

2) Transparansi

Bersikap terbuka dan jujur dalam pengelolaan informasi dan pengelolaan uang sangat penting untuk mencegah ketidakpercayaan di antara para mitra.

3) Saling menguntungkan

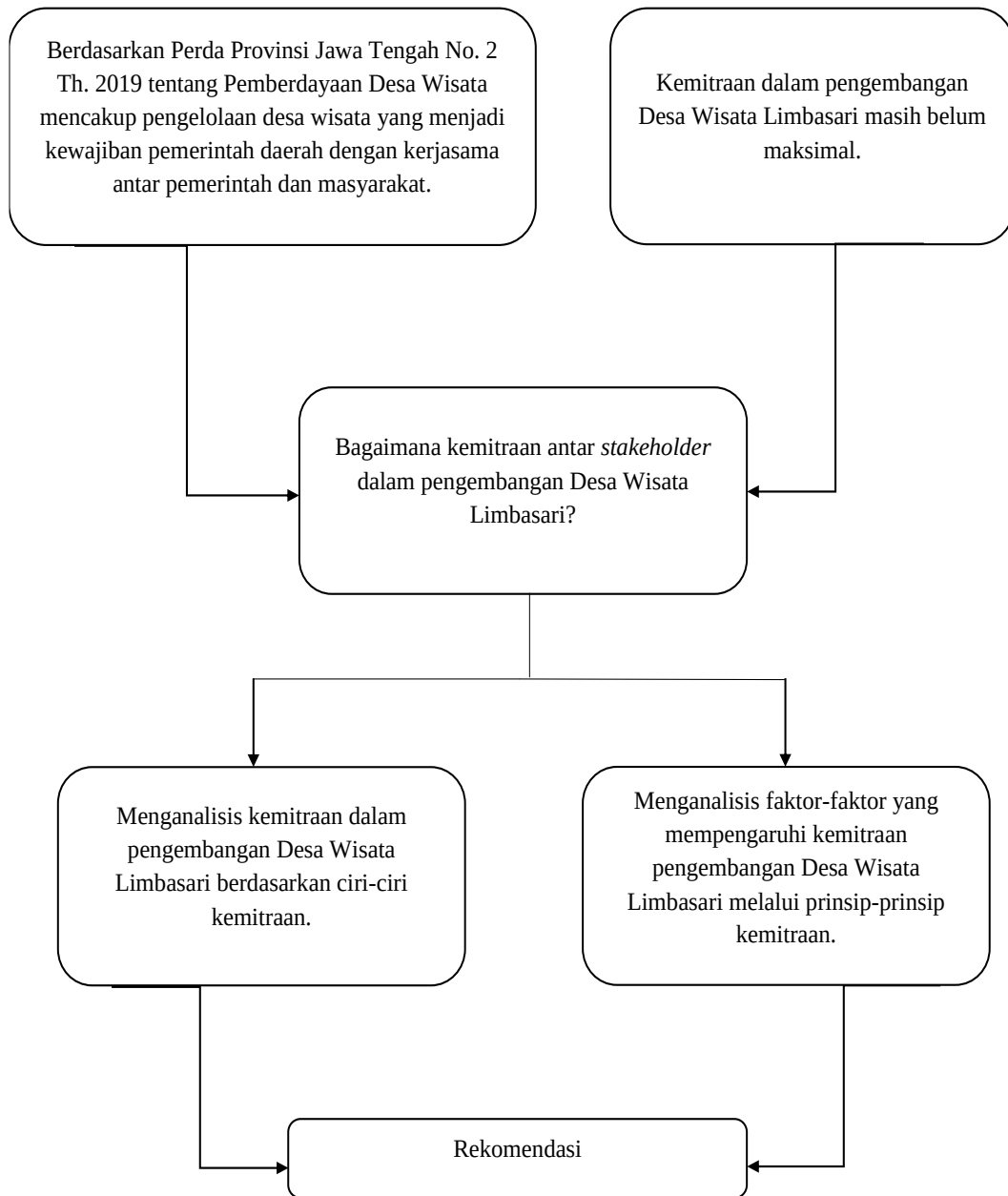
Semua orang yang berpartisipasi dalam kolaborasi harus mendapatkan sesuatu dari kolaborasi tersebut.

1.6.6 Desa Wisata

Sebuah desa wisata harus dibangun dengan prinsip pemberdayaan masyarakat, perbaikan lingkungan tanpa mengorbankan identitas lokal, dan penghormatan terhadap adat istiadat. Pembangunan bertujuan untuk melestarikan keunikan desa sambil meningkatkan layanan penting seperti akses jalan dan sanitasi. Daya tarik utama adalah keaslian lingkungan dan budaya, oleh karena itu partisipasi masyarakat sangat penting. Seberapa besar dukungan dan keterlibatan masyarakat lokal dalam keseluruhan proses pariwisata menentukan seberapa sukses sebuah kota wisata nantinya. Penduduk biasanya menyediakan

homestay dan mengajak wisatawan untuk merasakan kehidupan sehari-hari mereka. Konsep ini menekankan pentingnya peran serta seluruh anggota masyarakat dalam mendukung keberadaan desa wisata. Edward Inskeep dan Nuryanti menyatakan bahwa desa wisata menawarkan suasana tradisional yang unik, mengintegrasikan kehidupan lokal sebagai daya tarik utama, seperti kegiatan membatik atau menari.

1.7 Kerangka Pikir Penelitian



Sumber: Diolah oleh peneliti, 2025.

1.8 Fenomena Penelitian

Tabel 1. 5 Fenomena Penelitian

Tujuan	Fenomena	Sub Fenomena	Informan dan Metode Pengumpulan Data
Kemitraan dalam pengembangan Desa Wisata Limbasari	<i>Common Aim</i> (Tujuan Bersama)	• <i>Collaborative aims</i> (tujuan bersama yang disepakati semua pihak) • <i>Organization aims</i> (tujuan spesifik dari tiap organisasi/pihak yang terlibat) • <i>Individual aims</i> (tujuan individu dalam tiap pihak yang mendukung/menghambat kemitraan)	Informan: 1) Pokdarwis Patrawisa 2) Pemerintah Desa Limbasari 3) Dinporapar Kabupaten Purbalingga 4) Masyarakat Desa Limbasari Metode pengumpulan data: 1) Observasi 2) Wawancara 3) Dokumentasi
	<i>Sharing Power</i> (Pembagian Kekuasaan)	• Pembagian peran masing-masing pihak • Pembagian tanggung jawab tiap pihak.	
	<i>Compromise</i> (Kompromi)	• Proses negosiasi dan penyesuaian yang dilakukan untuk menemukan jalan tengah dalam perbedaan pendapat. • Pengambilan keputusan dari hasil negosiasi yang dilakukan.	
	<i>Communication</i> (Komunikasi)	• Kejelasan informasi dari tiap pihak. • Pola komunikasi yang terjalin pada tiap pihak.	
	<i>Determination Commitment</i> (Komitmen yang Kuat)	• Komitmen dalam pengelolaan agenda yang sesuai. • Keberlanjutan kolaborasi	
Faktor Pendorong dan Penghambat Kemitraan	Kesetaraan atau keseimbangan (<i>equity</i>)	• Pemenuhan kewajiban tiap pihak • Pemenuhan hak secara seimbang.	
	Transparansi	• Keterbukaan dalam informasi • Pengambilan keputusan	

		• Evaluasi	
	Saling menguntungkan	Manfaat yang diperoleh setiap pihak yang terlibat dalam menjalankan masing-masing perannya.	

1.9 Metode Penelitian

1.9.1 Tipe Penelitian

Pendekatan kualitatif deskriptif di penelitian ini mencoba untuk memberikan gambaran rinci tentang sebuah fenomena yang tidak dapat diukur secara kuantitatif. Djam'an Satori menyatakan bahwa metode ini digunakan untuk menyelidiki elemen-elemen deskriptif seperti tradisi, ide, atau budaya. Sugiyono melanjutkan dengan mengatakan bahwa filosofi post-positivisme berfungsi sebagai dasar untuk penelitian ini, yang menekankan makna daripada generalisasi dan menggunakan peneliti sebagai alat utama.

Menurut Nana Syaodih Sukmadinata, tujuan utama dari penelitian kualitatif deskriptif adalah untuk mengkarakterisasi kejadian-kejadian buatan manusia maupun alamiah, serta hubungan-hubungan di antara berbagai kegiatan, tanpa mengubah variabel-variabel yang diteliti. Data dikumpulkan melalui pengamatan, wawancara, dan pencatatan; tujuannya adalah untuk mendeskripsikan kondisi-kondisi yang ada saat ini, dan bukan untuk mengubahnya.

1.9.2 Lokus dan Fokus Penelitian

Sesuai dengan judul yang diberikan, lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian dilakukan. Desa Wisata Limbasari,

Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga, merupakan lokasi penelitian ini. Dalam penelitian kualitatif, pemilihan lokasi penelitian merupakan tahap yang paling krusial karena memungkinkan untuk menentukan topik dan tujuan penelitian. Untuk mengumpulkan data primer, peneliti memilih Desa Wisata Limbasari yang merupakan penyumbang PAD terbesar kedelapan di Kabupaten Purbalingga dan menjadi salah satu desa wisata dalam kategori berkembang.

1.9.3 Subjek Penelitian

Menyelidiki Individu atau sekelompok individu yang akan dimintai keterangan tentang suatu fakta atau pendapat pribadi disebut sebagai subjek atau informan. Pemilihan subjek penelitian harus sesuai dengan masalah yang diteliti agar pertumbuhan Desa Wisata Limbasari menjadi salah satu subjek dalam penelitian ini. Agar dapat mencakup semua orang yang terlibat dalam pelaksanaan pengembangan desa wisata, peneliti membutuhkan informan dalam jumlah yang banyak. Sebagai fokus pengembangan desa wisata, informan tersebut antara lain Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Purbalingga, Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Patrawisa, dan Pemerintah Desa Limbasari.

1.9.4 Jenis dan Sumber Data

Menurut Wiratna Sujarweni (2014), ada dua kategori data penelitian: data kuantitatif itu bentuknya angka dan data kualitatif itu bentuknya kata atau frasa. Data kualitatif yang digunakan di penelitian

ini sumbernya dari teks atau informasi yang disumbangkan oleh narasumber.

Sugiyono (2009) mendefinisikan sumber data sebagai segala sesuatu yang memberikan informasi penting untuk penelitian. Selain data sekunder yang diambil dari buku-buku, makalah, publikasi ilmiah, dan arsip-arsip pemerintah untuk melengkapi data primer, sumber data yang digunakan yaitu data primer - informasi yang didapat secara langsung dari narasumber melalui observasi dan wawancara.

1.9.5 Teknik Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data merupakan tahap yang krusial dalam proses penelitian untuk mendapatkan data yang memenuhi kriteria. Metode pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian kualitatif antara lain wawancara, dokumentasi, dan observasi. (Sugiyono, 2015).

Dengan menggunakan indera terutama mata dan telinga seseorang dapat meneliti kejadian alam, perilaku manusia, atau proses kerja. Peneliti dan informan melakukan wawancara langsung untuk mendapatkan informasi yang relevan. Untuk melengkapi data penelitian, dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan bahan dari buku, surat kabar, transkrip, catatan, dan sumber-sumber lainnya.

1.9.6 Analisis dan Interpretasi Data

Metode analisis data kualitatif yang dipakai dalam penelitian ini mencoba untuk mengkarakterisasi para pelaku, fungsi mereka, dan

tindakan terbaik untuk pengembangan Desa Wisata Limbasari. Penelitian ini menganut paradigma Miles, Huberman, dan Saldana, yang terdiri dari tiga kegiatan utama yang terjadi bersamaan.

Langkah pertama adalah kondensasi data, yang merupakan proses menyaring dan memilih informasi yang paling penting dari catatan lapangan dan wawancara untuk membuatnya relevan dan terfokus. Yang kedua adalah display data, yang melibatkan penyajian data dalam bentuk tabel, bagan, atau grafik untuk membantu pemahaman dan perencanaan langkah selanjutnya. Langkah ketiga adalah penarikan kesimpulan, yang melibatkan pengembangan dan konfirmasi kesimpulan berdasarkan data yang telah dirangkum dan disajikan dengan cara yang membuat kesimpulan tetap relevan dengan temuan penelitian.

1.9.7 Kualitas Data atau Validitas Data

Triangulasi, yang bersifat menggabungkan dari berbagai metode dan sumber data untuk menghasilkan data yang dapat dipercaya, merupakan pendekatan keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini (Sugiyono, 2013: 330). Triangulasi teknik dan triangulasi sumber merupakan dua bentuk triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini.

Beberapa teknik pengumpulan data, termasuk observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan topik yang sama, digunakan dalam triangulasi teknik. Untuk menjamin konsistensi data yang

dikumpulkan, triangulasi sumber dilakukan dengan mewawancarai banyak informan dengan menggunakan metodologi yang sama.